

KEPENTINGAN MAROKO TERHADAP NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL TAHUN 2020

Raudina Hidayati¹

Abstract: *what kind of interest that want to be achieved by Morocco under the policy in returning the normalization of diplomatic relations to Israel that has been finished over two decades (20 years) precisely in 2020. In addition, Morocco is known as the initiator of IOC (Islam Organisation Convergence) whereas the focus is the Freedom of Palestine. Under the decision in normalizing the diplomatic relations of Morocco-Israel in 2020, the researcher concluded that there is a geographical, economical, and political interest related to the West Sahara where it is considered as the disputed territory between Morocco and group of liberation struggle (Front polisario), indeed this kind of normalization become one of Morocco's strategy in legitimating West Sahara territory by diplomatically collecting positive supports or even other countries' weaponry.*

Keywords: *Morocco, The Normalization of Diplomatic Relations, Israel, Concept of National Interest*

Pendahuluan

Sejarah awal yang menghubungkan Maroko dengan Israel dapat di lihat dari sisa komunitas Yahudi yang tinggal dan menetap di Maroko, dimana Maroko pernah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia Arab. Seperempat juta orang Yahudi pernah tinggal di Maroko selama lebih dari 2000 tahun, sebelum banyak dari orang-orang Yahudi Maroko yang memutuskan untuk melakukan migrasi setelah berdirinya Israel pada 1948 (Jazeera n.d.).

Hubungan resmi antara Maroko dan Israel ini kemudian baru dimulai pada tahun 1994 ditandai dengan dibukanya kantor diplomatik Maroko di Israel setelah adanya perjanjian damai Israel-Palestine (perjanjian Oslo), hingga dikeluarkannya perangko dengan gambar Raja Hassan II (Raja Maroko) oleh Israel pada tahun 1999 (Taher, 2020).

Manfaat dari pembukaan kantor diplomatik ini dapat dilihat terutama pada sektor pariwisata, dimana setiap tahunnya sejak 1994 hingga 1996 tercatat setidaknya sebanyak 20.000 orang Israel telah mengunjungi Maroko tiap tahunnya (Ghariani, n.d. :19). Tidak hanya pada sektor pariwisata manfaat pembukaan kantor diplomatik ini juga dapat terlihat pada sektor bisnis dimana hal ini meningkatkan kunjungan para pejabat kedua negara, pengusaha dan delegasi perdagangan (Ghariani, n.d. : 20).

Meskipun bermanfaat pada tahun 2000 terjadi perubahan di mana Maroko memutuskan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel, dengan memutuskan untuk menutup kantor diplomatiknya di Israel dan memanggil kembali semua diplomatnya (Leichman 2020). Pemutusan hubungan ini menyusul resolusi Liga Arab yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel, dimana keputusan ini dilakukan setelah pecahnya Itifadah Al-Aqsa kedua atau perang pembebasan nasional bangsa Palestina (Ghariani, n.d.op.cit.,21).

Setelah dua dekade berlalu pada tahun 2020 hubungan antara Maroko dan Israel

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UniversitasMulawarman. E-mail: raudinaahidayatii@gmail.com

mulai menunjukkan peningkatan dengan diterimanya paspor Israel untuk masuk ke Maroko (Mhajne 2018). Penerimaan paspor Israel ini kemudian menjadi langkah awal dalam upaya kedua negara untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik.

Hingga pada 10 Desember 2020, Maroko dan Israel yang di wakikan oleh mantan presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan untuk menormalisasikan kembali hubungan diplomatik antar kedua negara dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Keputusan tersebut kemudian menjadikan Maroko sebagai negara keempat di kawasan Timur Tengah yang memutuskan untuk menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel setelah Uni Emirat Arab, Sudan dan Bahrain.

Pernyataan resmi normalisasi kedua negara disampaikan melalui dokumen perjanjian normalisasi hubungan diplomatik Maroko Israel pada 22 Desember 2020 di Rabat (ibu kota Maroko) dengan di tandatanganinya “JOINT DECLARATION ,The Kingdom of Morocco, the United States of America and the State of Israel” (Cuevas 2022).

Dengan adanya perjanjian ini kemudian menimbulkan banyak kontra, mengingat bahwa Maroko merupakan salah satu negara yang mencetus pendirian Organisation of Islamic Cooperation (OIC) atas prakasa Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi) pada 1969 (“Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Deklarasi Jakarta” 2016).

OIC sendiri merupakan sebuah organisasi yang bertujuan mempromosikan solidaritas Islam dengan mengkordinasikan kegiatan sosial, ekonomi, ilmiah dan budaya. Organisasi ini juga berkomitmen untuk menghapuskan segregasi dan diskriminasi rasial, terutama yang berkaitan dengan Palestina. Organisasi ini didirikan tepatnya setelah adanya peristiwa pembakaran Masjid AL- Aqsa, yang memicu negara-negara yang tergabung di dalam OIC terutama negara-negara Islam untuk memutuskan hubungan dalam berbagai aspek dengan Israel dan mengecam tindakan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina.

Tergabungannya Maroko di dalam OIC yang berkomitmen dalam pembebasan bangsa Palestina oleh penjajahan Israel ini kemudian di nilai bertolak belakang dengan keputusan normalisasi yang di lakukannya dengan Israel. Hal ini dinilai mengkhianati perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri dari konflik berkepanjangan dengan Israel dimana solidaritas dan dukungan Maroko terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina menjadi di pertanyakan.

Berbagai respon negatif baik dari dalam maupun luar negeri bermunculan dalam menanggapi keputusan politik Maroko ini, salah satunya Kelompok Hamas Palestina yang melalui juru bicara, Hamas Sami Abu Zuhri yang mengutuk penandatanganan perjanjian normalisasi perdana menteri Maroko sebagai kekecewaan besar bagi rakyat Palestina dan perjuangan mereka (Barakat 2020). Kecaman juga dilontarkan oleh Iran dengan menyebut kesepakatan normalisasi Maroko-Israel sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam (“Iran Slams Morocco-Israel Normalisation Deal as Betrayal of Islam” 2020).

Tidak hanya dari luar negeri kecaman juga datang dari partai nasional hingga kelompok-kelompok agama yang ada di Maroko. Salah satunya partai keadilan dan amal Maroko yang mengkritik keras bahwa kebijakan yang di ambil pemerintah Maroko dinilai tidak akan membawa stabilitas ataupun manfaat ekonomi (“Normalising Ties with Israel a ‘Crime’, Says Morocco Party” 2021).

Kecaman juga di sampaikan oleh kelompok-kelompok agama Maroko seperti al-Adl wa al-ihsan (keadilan dan kebajikan) yang mengatakan bahwa normalisasi Maroko

dan Israel merupakan “tikaman dari belakang untuk Palestina”, tak jauh berbeda kelompok Gerakan Persatuan dan Reformasi atau yang di kenal sebagai The Movement for Unity and Reform (MUR) menyatakan bahwa langkah normalisasi ini sebagai langkah yang “menyedihkan” dan mengecam “semua upaya normalisasi dan infiltrasi zionis” (The Guardian 2020).

Sangat berbeda dengan yang terjadi di Israel, dimana normalisasi ini di sambut baik dan dinilai sebagai reunifikasi yang dapat menghubungkan kembali orang-orang keturunan Yahudi Maroko di Israel untuk dapat mengunjungi kembali tanah leluhur mereka di Maroko dan sebaliknya.

Keputusan Maroko untuk menormalisasikan kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel yang berbanding terbalik dengan keikutsertaannya di dalam OIC, dimana Maroko merupakan salah satu negara anggota dan pencetus pendirian OIC ini sendiri. Kemudian dengan melihat berbagai kecaman internal maupun eksternal akibat perubahan komitmen Maroko terkait pengambilan keputusan normalisasinya dengan Israel. Dari latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang menyebabkan Maroko mengambil kebijakan untuk menormalisasikan Kembali hubungan diplomatiknya dengan Israel.

Landasan Konsep

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (national interest) merupakan aspek yang penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan atau sesuatu yang dicita-citakan dalam pemenuhan kebutuhan satu bangsa atau negara, di mana pada umumnya kepentingan nasional merupakan gambaran dari kebutuhan internal suatu negara yang meliputi politik, ekonomi maupun militer.

Kepentingan nasional ini juga di klasifikasikan oleh Thomas W. Robinson kedalam enam kategori yang di kutip dari (Sharma and S.K n.d., 127) Yakni :

1. Kepentingan Utama: perlindungan atas wilayah, identitas politik, negara, kebudayaan terhadap kemungkinan campur tangan negara lain. Setiap negara memiliki kepentingan ini dimana dalam mempertahankan kepentingan ini memerlukan pengorbanan yang besar.
2. Kepentingan sekunder, kepentingan ini berada satu tingkat di bawah kepentingan utama, di mana kepentingan ini cukup penting untuk keberadaan sebuah negara. Kepentingan ini berupa perlindungan warga negara di luar negeri serta memastikan kekebalan diplomatik bagi diplomat.
3. Kepentingan permanen, kepentingan ini merupakan kepentingan yang bersifat jangka panjang dan di butuhkan secara terus-menerus oleh negara.
4. Kepentingan Variabel, kepentingan ini merupakan kepentingan yang kondisional atau di anggap penting dalam jangka waktu tertentu.
5. Kepentingan umum, kepentingan ini diberlakukan untuk banyak negara dalam bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik.
6. Kepentingan Spesifik, kepentingan ini adalah melalui pertumbuhan logis dari kepentingan umum, kepentingan khusus didefinisikan dalam hal waktu atau ruang.

Dari klasifikasi di atas, terdapat dua kepentingan yang mewakili keputusan normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel yakni kepentingan utama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan kepentingan umum yang berupa ekonomi.

Untuk mewujudkan sebuah kepentingan nasional suatu negara tidak dapat di

pungkiri bahwa diperlukannya kekuatan lain untuk mendorong kepentingan utama. Dalam hal ini ekonomi menjadi salah satu kekuatan yang di perlukan untuk mendukung perwujudan kepentingan politik suatu negara. Sehingga dalam waktu yang sama kekuatan ekonomi merupakan dasar yang penting untuk kekuatan politik suatu negara.

Hal ini didasari oleh pemikiran merkantilis di mana pencapaian kekuatan ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara, dan kekuatan politik militer meningkatkan dan memperkuat kekuatan ekonomi negara (Jackson and Sørensen 2013, 286). Untuk itu ekonomi menjadi tujuan kedua setelah tujuan utama yang ingin di capai.

Metode

Metode yang digunakan adalah eksplanatif (Explanatory Research)., dimana Pada penelitian eksplanatif peneliti tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Dengan kata lain, peneliti ingin menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan ”mengapa (why)”. Di mana pada penelitian ini di maksud untuk menjelaskan mengapa normalisasi ini dapat terjadi dan menganalisis kepentingan Maroko di dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel. Jenis data yang digunakan ialah sumber data sekunder melalui studi kepustakaan atau library research berupa jurnal, buku, artikel online, internet, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan Maroko-Israel Sebelum Normalisasi Tahun 2000 – 2020

Sebelum tercapainya keputusan normalisasi Maroko-Israel pada Desember 2020, Maroko pernah secara terang-terangan menunjukkan penolakan terhadap normalisasi dengan Israel. Hal tersebut dibuktikan oleh Perdana Menteri Maroko Saad-Eddine El Othmani yang menyatakan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi dengan Israel. Penolakan tersebut sebenarnya merupakan sebagai respon Maroko terhadap Uni Emirat Arab (UEA) yang terlebih dahulu melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada 15 September 2020. Hal tersebut pun menunjukkan terjadinya bentuk ketegangan antara Maroko dan Israel, yang justru juga turut mempengaruhi dinamika politik kawasan Timur Tengah dan Afrika (Tahmi, Rosyidin, & Faiz, 2022).

Di kutip dari halaman berita (Bandaris 2020) Saad-Eddine Othmani menyatakan dalam pertemuan dengan partai politik Maroko Justice and Development party (PJD) :

“We refuse to normalize relations with the Zionist entity (Israel) because this will embolden it to further breach the rights of the Palestinian people,”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Saad-Eddine Othmani, dapat dilihat bahwasanya Maroko melakukan penolakan atas keterbukaan hubungan dengan Israel mengingat konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung selesai. Penolakan tersebut memang berhubungan dengan apa yang dialami Palestina dalam dua dekade terakhir. Secara konsisten, Maroko selalu menunjukkan dukungannya terhadap kebebasan Palestina dari tekanan bangsa Israel, hal ini didukung dengan fakta bahwa selama 20 tahun terakhir Raja Mohammed VI menempati posisi ketua komite Al-Quds di dalam

Organization Islamic Cooperation (OIC) yang mana organisasi ini juga bertujuan untuk mendukung kebebasan Palestina (Ahmed, 2021).

Namun di saat yang bersamaan, pada kenyataannya Maroko juga diketahui telah lama menjalin hubungan informal dengan Israel. Hal tersebut terjadi tepatnya setelah kematian Raja Hassan II pada 1999, putranya yakni Raja Mohammed VI yang terus mempertahankan pemulihan hubungan Maroko dan Israel secara rahasia yang dipicu oleh pecahnya kekerasan selama intifadah Al-Aqsa kedua (Cuevas, Salas 2022).

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang tercatat yang di kutip dari (Taher 2020) yakni :

1. Pada 1 September 2003 Menteri Luar Negeri Israel yang pada saat itu dijabat oleh Silvan Shalom, mengunjungi Maroko dan bertemu dengan Raja Mohammed VI.
2. Pada Juli 2007 menteri luar negeri Israel saat itu Tzipi Livni bertemu dengan Menteri Luar Negeri Maroko saat itu Mohamed Benaissa di Paris, Prancis.
3. Pada tahun 2008 terjadi pertukaran tahanan antara Israel dan kelompok Hizbullah Libanon termasuk sisa-sisa tiga Syuhada Maroko yang telah bergabung dengan barisan perlawanan Palestina dan Arab pada tahun 1970-1980an.
4. Pada 4 September 2009, Raja Mohammed VI berdiskusi dengan perdana menteri Israel yang saat itu di jabat oleh Ariel Sharon tentang peta jalan perdamaian di Timur Tengah melalui telepon.
5. Pada Maret 2013 angkatan udara Maroko memperoleh 3 drone heron yang dipindahkan dari Israel ke Prancis yang kemudian di cat dan dikirim ke Maroko.
6. Pada 2014 dalam sebuah laporan oleh departemen bisnis, inovasi dan keterampilan Inggris, yang mengawasi ekspor pertahanan Inggris. Di klaim bahwa Israel menjual sistem peperangan elektronik, komunikasi, dan kontrol ke Maroko.
7. Pada Februari 2019, channel 13 Israel melaporkan bahwa perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam telah bertemu dengan menteri luar negeri Maroko Nasser Bourita di New York, di sela-sela majelis umum PBB.
8. Pada tahun yang sama yakni 2019 Maroko membeli radar militer dan sistem komunikasi dari Israel melalui negara ketiga.

Dampak Normalisasi Hubungan Maroko-Israel

Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel ini kemudian menimbulkan banyak respon negatif dan penolakan dari rakyat Maroko sendiri. Penolakan tersebut didasarkan pada kekecewaan rakyat atas keputusan Raja Maroko yang justru menjalin upaya normalisasi bersama Israel, di tengah konflik Palestina dan Israel yang terus terjadi. Bahkan, rakyat Maroko mempertanyakan solidaritas Raja terhadap Perjuangan Palestina dan komitmen Raja sebagai ketua komite Al-Quds. Maroko pun dilihat sebagai pihak yang tidak dapat memegang prinsip sejak awal, apalagi Maroko telah melakukan penolakan secara terang-terangan terhadap normalisasi dengan Israel (Bandaris 2020).

Salah satu penolakan datang dari partai politik Maroko PJD lewat juru bicaranya Zaydan al-Qaani yang meminta OIC untuk mencabut kepemimpinan Maroko atas komite Al-Quds yang telah 20 tahun di pegang oleh Maroko dan menyerahkannya ke pada negara Islam lainnya (Mayadeen 2021). Zaydan al-Qaani justru melihat apa yang dilakukan pemerintah Maroko dalam normalisasi dengan Israel merupakan bentuk pengkhianatan utamanya bagi negara-negara Islam di OIC (OKI).

Selain itu, dengan bergabungnya Maroko sebagai negara keempat yang melakukan

normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel menjadikan dinamika geopolitik kawasan menegang. Hal tersebut dilihat dari upaya Israel yang terus melakukan aneksasi terhadap Tepi Barat Palestina yang tidak diragukan lagi dapat mempengaruhi masa depan hubungan bilateral mereka di kawasan. Normalisasi Maroko dan Israel pun membuktikan keduanya menjadi sekutu yang kuat di kawasan yang dapat menjaga stabilitas kawasan di Timur Tengah dan Afrika, yang mana dalam hal ini juga berpotensi menambah ketegangan yang tengah berlangsung di kawasan (Barakat, 2020).

Kepentingan Maroko Yang Melatarbelakangi Keputusan Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel

Kepentingan Maroko dalam keputusannya untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel ini sebenarnya tidak lepas dari keberadaan Sahara Barat, yang kemudian wilayah Sahara Barat ini yang nantinya akan menjadi dasar kepentingan Maroko dalam keputusan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel pada 2020.

Sahara Barat merupakan sebuah wilayah jarang penduduk yang terletak di bagian Afrika Utara. Dimana secara geografis wilayah ini berbatasan dengan Maroko di utara, Aljazair di timur laut, Mauritania di sebelah timur dan selatan, juga Samudra Atlantik di bagian barat (“Western Sahara | Facts, History, Conflict, Map, & Population | Britannica” n.d.).

Sebagian besar wilayah ini merupakan gurun pasir yang memiliki kandungan mineral berharga seperti biji besi, titanium oksida, vanadium dan kemungkinan cadangan minyak (Zoubir 2010). Wilayah ini juga di ketahui memiliki cadangan fosfat yang besar serta wilayah perairan dengan garis pantai sepanjang 1.110 km persegi dan luas wilayah daratan sekitar 252.120 km persegi (Chograni 2021). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Sahara Barat ini menjadikan negara-negara tetangga berupaya melakukan sengketa terhadap wilayah tersebut, salah satunya Maroko.

Menengok dari sejarah yang ada, Sahara Barat dulunya merupakan wilayah bekas koloni Spanyol yang terletak di pantai Atlantik Afrika antara Maroko dan Mauritania, dimana bangsa kolonial membagi kekuasaan atas benua Afrika melalui konferensi Berlin (Berlin Conference) pada 1884, yang kemudian disepakati termasuk di dalamnya wilayah Sahara Barat yang di duduki oleh bangsa Spanyol pada tahun 1912.

Wilayah Sahara Barat juga merupakan wilayah yang disengketakan oleh Maroko dan kelompok Front polisario (Front for the Liberation of el-Hamra and Rio de Oro) yaitu sebuah kelompok gerilya yang berjuang untuk memerdekakan Sahara Barat yang di bentuk pada 1973 yang mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Sahrawi (penduduk suku asli Sahara Barat).

Kelompok ini pada awalnya bergerilya untuk mengakhiri pendudukan bangsa Spanyol yang mendominasi wilayah Sahara Barat. Dimana pada 1975 Spanyol menandatangani perjanjian Madrid untuk membagi kekuasaan atas wilayah Sahara Barat menjadi dua bagian yakni atas Maroko dan Mauritania, yang kemudian solusi ini ditentang oleh kelompok Front Polisario yang mengubah arah perlawanan Front Polisario sejak saat itu yakni melawan Maroko dan Mauritania (Correale 2016).

Hingga pada akhirnya Spanyol berhasil menarik diri pada tahun 1975 dan menyerahkan kendali administratif atas dua pertiga wilayah Sahara Barat kepada Maroko (“What Is Western Sahara and Why Does Morocco Claim Sovereignty over It?” 2020). Sejak saat itu, Maroko mulai melakukan kendali atas sebagian besar wilayah Sahara Barat

hingga saat ini.

Kemudian pada tahun 1991 Front Polisario mendeklarasikan diri sebagai SADR (Republik Demokratik Arab Sahrawi) yang mengklaim keseluruhan wilayah Sahara Barat. Di mana hal ini menimbulkan bentrok antara Maroko dan kelompok Front Polisario yang terus berlangsung hingga tahun 1991 hingga perjanjian gencatan senjata di tandatangani di tahun tersebut (“Western Sahara | Facts, History, Conflict, Map, & Population | Britannica” n.d.).

Beragam pemberontakan selama 16 tahun antara Maroko dan Front Polisario berakhir dengan gencatan senjata yang di tengah PBB pada tahun 1991 dan janji referendum untuk menentukan nasib sendiri yang hingga kini belum terwujud (BBC News 2011).

Nilai Penting Wilayah Sahara Barat

Dalam menjalankan interaksi antar negara, setiap aktor negara tentunya memiliki sejumlah motivasi atau kepentingan nasional yang berupaya dicapai untuk keberlangsungan negaranya. Untuk memahami kepentingan nasional suatu negara, Thomas W. Robinson menjadi salah satu pakar teori studi Hubungan Internasional yang menyumbangkan ide-idenya melalui klasifikasi terhadap kepentingan nasional kedalam 6 kategori. Kategori yang disampaikan Thomas W. Robinson ini pun yang selanjutnya akan dijadikan acuan utama dalam menganalisis kepentingan nasional Maroko dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel, negara yang selama ini memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Afrika melalui aksi kejahnya di konflik Israel dan Palestina (Ahmed, 2021).

Normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel pada 2020 ini kemudian dilandaskan pada nilai-nilai penting atau strategis yang di miliki wilayah Sahara Barat yang kemudian digambarkan sebagai kepentingan yakni dalam hal geografis, ekonomi dan juga politis. Untuk kategori pertama seperti yang telah dijelaskan Robinson ialah kepentingan utama yang dimana dalam hal ini berupa perlindungan geografis atas wilayah, identitas politik, negara serta kebudayaan terhadap kemungkinan campur tangan negara lain.

Sesuai dengan namanya, kepentingan geografis akan menjadi motivasi sebuah negara dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan pihak asing. Kepentingan geografis ini berdasarkan pada urusan wilayah sebuah negara yang ingin memiliki kontrol atau kekuasaan lebih. Selain itu, kepentingan geografis ini juga menjadi alasan bagi negara untuk terus melakukan upaya perlindungan terhadap wilayah yang selama ini menjadi kedaulatannya agar tidak mendapatkan campur tangan atau intervensi dari pihak asing (Adwitama, 2022).

Dalam hal ini ada kepentingan yang menjadi tujuan bagi Maroko khususnya untuk wilayah Sahara Barat, dimana Maroko mengklaim kedaulatan negaranya atas wilayah tersebut, sehingga bagi Maroko wilayah, identitas politik, negara serta kebudayaan yang terdapat di wilayah Sahara Barat harus dilindungi dari campur tangan pihak lain, utamanya dari kelompok pergerakan Front Polisario.

Adanya motivasi untuk melindungi wilayah Sahara Barat dari intervensi pihak asing merupakan upaya serius yang dilakukan Maroko. Apalagi, secara historis, dekolonisasi yang terjadi pada masa lampau memunculkan kembali ambisi Maroko untuk menguasai wilayah Sahara Barat lagi.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil kesepakatan Spanyol yang saat itu

menyerahkan sebagian wilayah Sahara Barat untuk dikuasai oleh Maroko. Namun, sayangnya, wilayah yang seharusnya dikontrol oleh Maroko juga mendapatkan penolakan dari kelompok pergerakan Front Polisario (Adwitama, 2022). Di mana dalam kasus ini wilayah Sahara Barat juga di klaim kedaulatannya oleh kelompok Front Polisario sebagai perwakilan rakyat Sahrawi (Miller 2014).

Kedaulatan atas wilayah ini sendiri hingga saat ini masih menjadi sengketa yang diperebutkan oleh Maroko dan kelompok pemberontak dari Sahara Barat yaitu Front polisario. Pada awalnya, Maroko mengklaim adanya ikatan antara Sahara Barat dengan kesultanan Maroko di masa lalu tepatnya sebelum kedatangan bangsa kolonial Spanyol yang membagi kekuasaan atas wilayah Maroko dan Sahara Barat (Leite and Olsson 2006). Namun, klaim tersebut justru ditolak oleh kelompok Front Polisario, yang dimana kelompok tersebut menyuarakan untuk diberikannya kebebasan bagi Sahara Barat untuk dapat menjadi negara utuh dan tidak lagi menjadi bagian dari Maroko.

Dengan meninjau sejarah yang ada, klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat ini kemudian didasari oleh prinsip integritas bahwa terdapat bukti faktual dengan di terbitkannya peta Maroko Raya pada tahun 1964, yang menggambarkan wilayah Maroko sebelum dibagi oleh bangsa Spanyol dan Prancis, dengan wilayah Sahara Barat yang masih menjadi bagian dari Maroko (“Menengok Sejarah Sahara Maroko, Apa Maksud Provokasi Polisario?” 2020).

Selain karena kekayaan sumber daya alam dan letaknya yang strategis sebagaimana hal tersebut dimiliki oleh wilayah Sahara Barat, Maroko juga menyatakan bahwa terdapat ikatan budaya, agama dan politik antara Maroko dan penduduk serta suku-suku yang mendiami wilayah Sahara Barat dengan kesultanan Maroko di masa lalu, sehingga bagi bangsa Maroko sendiri menganggap jika Sahara Barat memiliki hubungan yang khas dan dekat dengan Maroko yang tidak dapat di pisahkan (Leite and Olsson 2006).

Pentingnya wilayah geografis Sahara barat juga tercemin dengan dibangunnya tembok pasir atau yang di sebut juga Berm oleh pemerintah Maroko. Tembok ini di bangun oleh Maroko tak lama setelah invasinya ke wilayah tersebut pada tahun 1975 (McNeish 2015).

Tembok pasir yang membentang sepanjang 2.7000 km dari Maroko selatan hingga ke Samudra atlantik di Guerguete ini dibangun selama masa konflik dari tahun 1975 hingga tahun 1991 oleh Angkatan Darat Kerajaan Maroko, Royal Moroccan Army (RMA), di mana 1.465 kilometernya membagi territory wilayah Sahara Barat menjadi bagian barat dan timur (“Territory of Western Sahara” 2022).

Tembok pasir ini di bangun oleh Maroko dengan tujuan untuk membatasi wilayah Sahara Barat dengan wilayah yang di duduki kelompok Front polisario. Di samping untuk membatasi Sahara Barat dengan campur tangan dari Front Polisario, secara bersamaan tembok ini juga menjadi basis pertahanan bagi Maroko untuk menghalau kekuatan kelompok Front polisario agar tidak menyebrang semakin luas ke wilayah yang telah di kuasai Maroko. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan Maroko dalam menjaga atau melindungi wilayah gurun pasir tersebut.

Di sepanjang tembok pasir tersebut juga terdapat sisa bahan peledak berupa ranjau darat yang di perkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 5.000.000 ranjau yang digunakan selama masa konflik antara Maroko dan kelompok Front polisario serta dijaga lebih dari 100.000 tentara Maroko.

Sehingga dengan pernyataan tersebut kepentingan Maroko di wilayah Sahara Barat

yakni untuk mengembalikan identitas politik wilayah Sahara Barat yang hilang akibat kedatangan bangsa Spanyol serta penghapusan klaim wilayah Sahara Barat ini oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah dari kelompok Front Polisario.

Oleh karenanya, dengan upaya normalisasi yang dilakukan oleh Maroko dengan Israel, Maroko mengharapkan adanya sekumpulan dukungan dan kekuatan yang datang dari Amerika Serikat sebagai kubu pendukung Maroko. Sedangkan di lain sisi, kelompok pergerakan Sahara Barat yakni Front Polisario ini berada di dalam bantuan Mauritania dan Aljazair yang menjadi pihak utama dalam hal penyuplai persenjataan di Sahara Barat, utamanya untuk melawan dan membebaskan diri dari Maroko (Middle East Monitor, 2021).

Kepentingan yang berlandaskan pada perlindungan atas wilayah Sahara Barat ini, bertujuan untuk menjaga identitas politik Maroko sebagai pemerintah berdaulat atas wilayah Sahara Barat dan perlindungan kebudayaan yang ada di Sahara Barat yang merupakan bentuk kepentingan utama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Thomas W. Robinson (Burchill, 2005).

Kepentingan utama ini lah yang menjadi motivasi atau dasar bagi Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel. Hal ini disebabkan karena bagi Maroko, ketika mereka menjalin normalisasi dengan Israel, mereka akan mendapatkan dukungan dari negara Super power Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kekuatan politik yang ada di wilayah Sahara Barat, yang sebagaimana wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh kehadiran kelompok pergerakan Front Polisario yang selama ini mendapatkan dukungan dari Aljazair dan Mauritania. (Adwitama, 2022)

Selain kepentingan utama, rupanya Maroko juga memiliki kepentingan nasional lainnya dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Adapun kepentingan lain Maroko untuk mendapatkan kedaulatannya di wilayah ini dinilai berhubungan dengan nilai ekonomi yang bersumber dari sumber daya alam yang terdapat di dalam Sahara Barat yang di kelola oleh pemerintah Maroko.

Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas. W. Robinson yang dimana salah satu kepentingan nasional suatu negara dapat berupa kepentingan umum, yaitu kepentingan yang menjadi landasan negara dalam mencapai salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan ekonomi negara.

Indikasi atau minat khusus yang dimiliki Maroko di wilayah Sahara Barat ini berhubungan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sebab kekayaan mineral alam utama wilayah ini ialah berupa batuan mineral fosfat dan sumber daya ikan. Di Sahara Barat sendiri terdapat tambang fosfat terbuka yang bernama Bou Craa yang merupakan salah satu tambang fosfat terbesar di dunia, tambang ini dinilai dapat menghasilkan sekitar 2,4 juta ton mineral fosfat pertahun yakni 14% dari produksi fosfat dunia (wilkinson 2018).

Bou craa sendiri dioperasikan oleh pemerintahan Maroko selama lebih dari 40 tahun melalui perusahaan tambang milik negara bernama OCP S.A (formerly Office Cherifien des Phosphates). Kehadiran OCP S.A ini menjadi kekuatan utama bagi Maroko karena OCP S.A berhasil melakukan ekspor fosfat kepada beberapa negara. Di mana hal ini di anggap melanggar hukum internasional serta melanggar hak-hak rakyat Sahrawi atas wilayah tersebut (“Western Sahara Resource Watch | The Conflict Phosphates - Four Decades of Plunder” 2022).

Pelanggaran hukum internasional tersebut secara langsung dilayangkan oleh

penasehat hukum PBB, tepatnya pada tahun 2002 dimana penasehat hukum PBB telah menyatakan bahwa eksploitasi lebih lanjut atas sumber daya alam Sahara Barat oleh Maroko ini melanggar hukum internasional. Hal ini kemudian membuat banyak importir memutuskan untuk menghentikan import fosfat dari tambang tersebut sebab aspek hukum internasional serta hak asasi manusia (Smith 2015).

Sebab aspek hukum internasional dan hak asasi manusia tersebut membuat sejumlah besar importir memutuskan untuk menghentikan keterlibatan mereka dengan tambang fosfat Bou Craa Sahara Barat yang di kutip dari ("Western Sahara Resource Watch | The Conflict Phosphates - Four Decades of Plunder" 2022) sebagai berikut :

1. Pada tahun 2010, perusahaan AS Mosaic memutuskan untuk menghentikan impor dari wilayah Sahara Barat, setelah menjadi pelanggan tambang Bou Craa selama beberapa tahun, " karena keprihatinan internasional yang meluas mengenai hak-hak orang Sahrawi di wilayah itu."
2. Yara international, perusahaan pupuk yang berbasis di Norwegia menyatakan bahwa "dalam keadaan saat ini ada baiknya menahan diri untuk tidak membeli fosfat yang berasal dari Sahara Barat", dan bahwa perusahaan "berharap suatu hari negara akan dibebaskan, dan kemudian penduduk akan mendapat manfaat jika kita dapat menerima fosfat mereka dengan cepat".
3. Wesfarmers mengumumkan penghentian impor semacam itu pada tahun 2012, tetapi tanpa menjelaskan mengapa dihentikan. Para investornya telah menekan perusahaan selama beberapa tahun.
4. Innophos Holdings, sebuah perusahaan di New York Stock Exchange, mengumumkan pada tahun 2018 keputusannya untuk berhenti membeli produk dari pabrik Nutrien di Baton Rouge (perusahaan importir yang membeli 50% batuan fosfat yang diekspor dari wilayah Sahara Barat), Louisiana "sebagai bagian dari komitmen Innophos terhadap tanggung jawab sosial secara keseluruhan dan pengelolaan perusahaan yang baik". Keputusan itu penting dalam keputusan Nutrien untuk menghentikan impor.

Dengan banyaknya importir yang memutuskan untuk menghentikan pembelian dari tambang fosfat Bou Craa tentu saja menjadi kerugian besar bagi Maroko, apalagi aspek hukum internasional atas wilayah ini menjadi halangan bagi Maroko untuk melakukan hubungan perdangan. Berdasarkan hal tersebut, melakukan klaim atas wilayah Sahara Barat ini pun menjadi sangat penting bagi Maroko agar dapat terus melanjutkan hubungan dagang khususnya pada tambang fosfat tersebut sebagai bentuk kemajuan perekonomiannya.

Tidak hanya eksploitasi sumber daya alam fosfat di Sahara Barat, Maroko juga melakukan pemanfaatan pada sumber daya ikan di pesisir wilayah tersebut. Pesisir wilayah Sahara Barat terbilang cukup luas dan sangat menjanjikan, hal tersebut dikarenakan pesisir wilayah Sahara Barat terdiri dari garis pantai yang memiliki panjang yakni sekitar 1200 km membuat wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan menguntungkan (Yulia Rimapradesi, Kepentingan Negara Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel, 2021).

Hal ini mendorong Maroko untuk membangun pelabuhan-pelabuhan besar yang beroperasi di wilayah selatan Sahara Barat yang di kuasai oleh Maroko, dimana Maroko membangun dua pelabuhan antara lain yakni pelabuhan laayoune (pelabuhan El Aainun) dan pelabuhan Dakhla (Menon 2021). Pelabuhan laayoune sendiri beroperasi sejak tahun

1986, sejak awal didirikan oleh pemerintah Maroko pelabuhan ini berfokus untuk mengeksport hasil tambang seperti fosfat dan pasir yang berasal dari wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu pelabuhan ini juga menjadi pusat penangkapan ikan dimana komoditi ini menyumbang sebanyak 43% dari pendapatan pelabuhan (Menon 2021).

Sama halnya dengan pelabuhan laayoune, aktifitas utama pelabuhan Dakhla yang terletak di semenanjung Oued Ed-Dahab ini adalah penangkapan ikan serta kargo dengan fasilitas khusus yang menangani ekspor suku cadang. Pelabuhan ini juga merupakan proyek strategi pelabuhan nasional Maroko hingga 2030 mendatang sebab terdapat permukiman penduduk masyarakat Maroko sebanyak 100.000 jiwa yang terdapat di daerah pelabuhan tersebut (“Morocco to Build \$1bn Port to Bolster Claim to the Western Sahara” 2019).

Dengan banyaknya masyarakat Maroko yang tinggal di daerah tersebut serta pembangunan pelabuhan-pelabuhan Maroko yang terdapat di wilayah Sahara Barat, hal ini kemudian menjadi salah satu strategi dalam pencapaian kepentingan nasional Maroko dalam mengintegrasikan wilayah Sahara Barat yang di kuasanya ke dalam tanah air mereka, serta bertujuan untuk mendukung ekonomi sosial dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Maroko.

Kepentingan dengan basis nilai ekonomi ini merupakan salah satu dari bentuk kepentingan umum, yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Thomas W. Robinson. Kepentingan ekonomi menjadi kepentingan umum sebab nilai ini akan selalu menjadi incaran setiap negara dalam melakukan interaksi bersama negara lain (Burchill, 2005).

Hal tersebut juga sesuai dengan kepentingan Maroko yang ingin menguasai Sahara Barat dengan menjalin normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel. Ambisi Maroko dalam menguasai Sahara Barat merupakan adanya keinginan Maroko untuk memiliki kontrol penuh atas wilayah Sahara Barat, wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa fosfat mau pun sumber daya alam di lautan.

Hubungan Sahara Barat dan Normalisasi Diplomatik Maroko dan Israel

Berdasarkan kajian historis dan fakta yang berada di balik wilayah Sahara Barat tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya Maroko akan senantiasa melakukan berbagai macam upaya dalam melindungi wilayah Sahara Barat agar tetap menjadi wilayah kekuasaannya. Maroko tidak menginginkan Sahara Barat mendapatkan pengaruh dari negara lain, bahkan Maroko juga belum ingin memerdekakan Sahara Barat.

Untuk melancarkan ambisinya dalam melindungi Sahara Barat dari pengaruh eksternal dan keinginan untuk mengontrol penuh atas wilayah tersebut, Maroko pun membutuhkan bantuan power dari negara-negara yang relevan dalam membantu Maroko. Upaya normalisasi yang dilakukan Maroko dengan Israel inilah yang kemudian dilihat sebagai salah satu strategi diplomasi Maroko untuk menguasai Sahara Barat. Menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel –berikut dengan negara super power Amerika Serikat—menjadikan Maroko akan mendapatkan dukungan penuh dari Israel dan Amerika Serikat (Middle East Monitor, 2021).

Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu Donald Trump, menjajikan pengakuan kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat dan menegaskan dukungannya terhadap proposal otonomi Maroko terkait perselisihan atas wilayah tersebut (Rabat 2020).

Dukungan ini juga dapat di lihat pada akun twitter presiden Amerika Serikat tersebut

yang di publikasikan pada 11 Desember 2020, dimana pada tweet tersebut Donald Trump menyatakan dukungannya terhadap klaim kedaulatan wilayah Sahara Barat oleh Maroko. Keseriusan pengakuan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat ini kemudian direalisasikan dengan dimulainya proses pendirian kantor konsulat oleh kedutaan besar Amerika Serikat untuk Maroko di wilayah Sahara Barat pada 10 Januari 2021 (France-Press 2021). Tentu saja hal ini juga merupakan bagian dalam strategi diplomasi Maroko dimana tidak menutup kemungkinan negara lain akan mengikuti langkah Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama yakni untuk mendirikan kantor perwakilan negara untuk Maroko di wilayah Sahara Barat.

Kepentingan Maroko mengenai wilayah Sahara Barat ini pun menjadi landasan utama bagi Maroko dalam melakukan normalisasi bersama Israel. Wilayah Sahara Barat menjadi motivasi utama bagi Maroko dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dimana secara sederhana dapat disimpulkan dengan normalisasi tersebut, Maroko akan meraih dukungan dari Amerika Serikat maupun Israel atas kekuasaan di wilayah Sahara Barat, wilayah yang strategis dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Yulia Rimapradesi, Kepentingan Negara Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel, 2021).

Hal tersebut pun yang sebenarnya selama ini Maroko inginkan dari Sahara Barat. Sahara Barat yang selama ini diisi oleh kekayaan sumber daya alam dan letaknya yang secara geografis begitu strategis bagi Maroko menjadi alasan utama mengapa Maroko senantiasa tertarik untuk melakukan kontrol di wilayah Sahara Barat. Apalagi, mengenai hal ini juga tidak lepas dari catatan historis yang dimana memang Sahara Barat pernah menjadi kekuasaan Maroko, setelah Maroko berhasil mengalahkan Spanyol saat menduduki Maroko kala itu (Yulia Rimapradesi, Kepentingan Negara Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel, 2021).

Selain itu, ketika Maroko menjalin normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel, sudah dipastikan Maroko juga telah berada dalam kelompok bersama Amerika Serikat. Dengan Maroko yang menjalin kerjasama dengan negara super power seperti Amerika Serikat ini pun menjadi bentuk perimbangan kekuatan yang dilakukan Maroko terhadap kekuasaan yang ada di wilayah Sahara Barat. Dimana selama ini Sahara Barat juga dipengaruhi oleh pergerakan Front Polisario yang mendapatkan suplai persenjataan dari Libya dan Aljazair (Adwitama, 2022).

Melakukan normalisasi dengan Israel juga dilakukan oleh Maroko sebab adanya kepentingan yang ingin di capai Maroko di wilayah Sahara Barat ini berhubungan dengan kepentingan politis yang ingin di capai Maroko melalui normalisasi hubungan diplomatik yang di jalin dengan Israel.

Mengingat kembali bahwasannya Maroko bukanlah satu-satunya negara yang melakukan perjanjian damai atau normalisasi dengan Israel, dimana Maroko merupakan negara muslim keempat di kawasan Timur Tengah setelah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan yang terlebih dahulu memutuskan menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel setelah negara tersebut setuju untuk menandatangani Abraham Accords pada 15 September 2020 di Gedung Putih Washington D.C.

Situasi atau kecenderungan negara-negara muslim di Timur Tengah untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel inilah yang juga menjadi pemicu Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang sama dengan

Israel, dimana negara-negara tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda sehubungan dengan normalisasi yang dilakukan. Hal ini lah yang Maroko coba lakukan untuk menjadikan normalisasi sebagai jembatan untuk mewujudkan cita-citanya terhadap wilayah Sahara Barat.

Untuk itu penulis melihat bahwasannya normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel ini merupakan sebuah strategi diplomasi Maroko yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara maupun kelompok lain untuk mengamankan wilayah Sahara Barat, walaupun hal ini pada akhirnya bertolak belakang dengan komitmen yang telah lama dibangun Maroko di dalam IOC terkait kebebasan Palestina, dimana hal ini sejalan dengan pemikiran Morgenthau bahwa strategi diplomasi harus di dasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggap khayalan dan bahkan berbahaya.

Untuk itu demi mencapai kepentingan nasional Maroko atas wilayah Sahara Barat, dan mengingat kekuatan nasional yang di miliki Maroko tidak begitu besar, kemudian Maroko merasa perlu untuk mendapatkan dukungan politik dari negara lain, dalam hal ini khususnya dukungan dari Amerika Serikat.

Kemudian adapula kepentingan lainnya, seperti yang telah peneliti paparkan di bagian 4.1 bahwa selama pra normalisasi Maroko dan Israel terdapat hubungan dagang pada sektor persenjataan antara Maroko melalui pihak ketiga. Di mana persenjataan ini dilaporkan digunakan untuk memerangi kelompok Front Polisario dalam perebutan wilayah Sahara Barat.

Salah satu persenjataan yang di peroleh Maroko ini adalah drone heron yang di produksi oleh Israel Aerospace Industries pada tahun 2013 senilai \$50 juta US dollar ("Haaretz: Morocco Secretly Received Weapons from Israel Years before Normalisation" 2021). Drone ini dapat bertahan di udara selama 45 jam dan mampu mencapai ketinggian 35.000 kaki, drone ini juga di lengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk pemantauan, patroli, identifikasi target serta pelaksanaan misi di medan yang berbeda (Yaron 2022).

Kemudian pada tahun 2017 Amnesty International (organisasi hak asasi manusia) melaporkan bahwa Maroko juga menggunakan perangkat lunak spionase yang di buat oleh perusahaan teknologi Israel Niv, Shalev and Omri Group (NSO Group) yang di gunakan untuk melacak dan mengumpulkan informasi tentang jurnalis dan aktivis hak asasi manusia Maroko yang kritis terhadap pemerintah Maroko (Hempel 2021).

Perdagangan persenjataan ini juga di ketahui dilakukan oleh Amerika Serikat tepat sehari setelah normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel di umumkan, di mana administrasi pemerintahan presiden Donald Trump melakukan kesepakatan penjualan persenjataan berupa drone dan senjata berpemandu presisi senilai \$ 1 miliar US dollar ke Maroko ("US Moving Ahead with \$1bn Arms Sale to Morocco: Report" 2020).

Drone yang di jual ke Maroko tersebut merupakan empat drone Sea Guardian jenis MQ-9B yang di buat oleh General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) yang memiliki jangkauan 6.000 mil laun (11.100 km) yang dapat mensurvei petak besar laut dan gurun, dan di rancang pula untuk beroperasi di wilayah udara sipil ("US Nears Sale of MQ-9B SeaGuardian Drones to Morocco" 2020).

Hal ini dilakukan Maroko sebagai upaya dalam menghapus segala klaim wilayah Sahara Barat dari pihak lain dengan cara memperkuat persenjataan negara. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Maroko dan Israel ini, besar kemungkinan Maroko dapat membeli persenjataan tersebut secara lebih terbuka

tanpa harus melalui negara ketiga.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik yang di lakukan Maroko dengan Israel pada tahun 2020 ini merupakan strategi diplomasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dukungan serta kekuatan politik dari pihak lain agar dapat mengklaim wilayah Sahara Barat kedalam wilayah kedaulatan Maroko.

Kepentingan dengan nilai politis, yang dimana dimaksudkan Maroko agar dapat meraih dukungan politik dari Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat.

Kesimpulan

Alasan Maroko sepakat untuk menormalisasikan hubungan diplomatiknya dengan Israel sebab Maroko ingin melegitimasi wilayah Sahara Barat yang terdapat di wilayah selatan Maroko menjadi bagian dari negaranya dimana kini wilayah tersebut masih menjadi wilayah yang di sengkatakan oleh Maroko dan kelompok masyarakat yang menghuni wilayah tersebut (front polisario).

Sahara Barat merupakan sebuah wilayah jarang penduduk yang terletak di bagian Afrika Utara. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Maroko di utara, Aljazair di timur laut, Mauritania di sebelah timur dan selatan, juga Samudra Atlantik di bagian barat. Sahara Barat menjadi wilayah yang bernilai cukup penting bagi Maroko, yang mana selanjutnya Sahara Barat pun dijadikan alasan utama Maroko dalam menjalin normalisasi hubungan diplomat bersama dengan Israel.

Bagi Maroko terdapat kepentingan yang menyangkut geografis wilayah Sahara Barat yang ingin di capai, di mana bagi Maroko wilayah ini merupakan bagian dari negaranya dengan dasar klaim bahwa terdapat ikatan antara Sahara Barat dengan kesultanan Maroko di masa lalu tepatnya sebelum bangsa kolonial membagi kekuasaan atas wilayah Afrika melalui Berlin Conference, yang kemudian termasuk di dalamnya wilayah Sahara Barat yang di duduki oleh bangsa Spanyol pada tahun 1912 dengan merujuk pada peta Maroko raya yang menunjukkan wilayah Sahara Barat sebelum kedatangan bangsa Spanyol.

Kepentingan yang berlandaskan pada perlindungan atas wilayah Sahara Barat, menjaga identitas politik Maroko sebagai pemerintah berdaulat atas wilayah Sahara Barat dan perlindungan kebudayaan yang ada di Sahara Barat merupakan bentuk kepentingan utama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Thomas W. Robinson. Kepentingan utama ini lah yang menjadi motivasi atau dasar bagi Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik bersama Israel. Hal ini disebabkan karena bagi Maroko, ketika mereka menjalin normalisasi dengan Israel, mereka akan mendapatkan dukungan dari negara Super power Amerika Serikat dalam menyeimbangkan kekuatan politik yang ada di wilayah Sahara Barat, yang sebagaimana wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh kehadiran kelompok pergerakan Front Polisario yang selama ini mendapatkan dukungan dari Aljazair dan Mauritania.

Kemudian juga terdapat kepentingan ekonomi di wilayah Sahara Barat yang menjadi tujuan Maroko, dimana Sahara Barat juga merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa tambang batuan mineral fosfat yang di kuasai oleh Maroko selama lebih dari 40 tahun serta menghasilkan sebanyak 2,4 juta ton fosfat pertahunnya serta melakukan ekspor ke beberapa negara. Kepentingan ekonomi inilah yang menjadi kepentingan umum bagi Maroko, sesuai dengan penjabaran Thomas W.

Robinson.

Tidak hanya fosfat Wilayah Sahara Barat juga kaya akan sumber daya ikan. Untuk itu Maroko membangun dua pelabuhan besar yang berfokus pada penangkapan serta mendorong kegiatan ekspor hasil bumi di wilayah tersebut. Pembangunan pelabuhan oleh Maroko di wilayah Sahara Barat ini juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan Maroko untuk meligitimasi wilayah Sahara Barat.

Kepentingan dengan nilai politis, yang dimana dimaksudkan Maroko agar dapat meraih dukungan politik dari Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat. Untuk mewujudkan tujuan Maroko terhadap wilayah Sahara Barat, Maroko memerlukan dukungan serta kekuatan politik dari pihak lain mengingat kekuatan nasional Maroko yang tidak begitu besar yang kemudian termasuk kedalam kepentingan politis Maroko. Yakni dengan keputusan normalisasi yang di ambil memungkinkan Maroko untuk dapat membeli dan memperoleh persenjataan tanpa melalui negara ketiga, serta dukungan Amerika Serikat yang menjajikan klaim wilayah Sahara Barat sebagai imbalan dalam keputusan normalisasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Bandaris, Mohammad. 2020. "Morocco Rejects Normalization with Israel." News. Anadolu Agency. August 24, 2020. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/morocco-rejects-normalization-with-israel-/1951337>.
- Barakat, Mahmoud Mohamed. 2020. " Hamas Decries Morocco-Israel Normalization of Ties." 12 2020. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-decries-morocco-israel-normalization-of-ties/2086014>.
- BBC News. 2011. "Western Sahara Profile," July 11, 2011, sec. Africa. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14115273>.
- Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>.
- Chograni, Houda. 2021. "The Polisario Front, Morocco, and the Western Sahara Conflict." Arab Center Washington DC. June 22, 2021. <https://arabcenterdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-th>